

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR
TERHADAP PAD PROPINSI SUMATERA UTARA PADA
SAMSAT MEDAN SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**HARRY PRAMANA
NIM : 07 832 0150**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA 011

Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Propinsi Sumatera Utara Pada Samsat Medan Selatan

Nama Mahasiswa : HARRY PRAMANA

No. Stambuk : 07 832 0150


Jurusan : Manajemen

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Drs. H. Miftahuddin, MBA)


(Ihsan Effendi, SE.,M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan


(Ihsan Effendi, SE.,M.Si)


(Prof. Dr. H. Sya'ad Afiduddin, SE.,M.Ec)

ABSTRAK

HARRY PRAMANA, Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Utara pada Samsat Medan Selatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Utara pada Samsat Medan Selatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Korelasi Product Moment, dengan teknik pengumpulan data adalah dengan Wawancara (*interview*), Dokumentasi (*documentation*) dan Observasi (*observation*).

Penulis telah melakukan analisis tentang analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Utara pada Samsat Medan Selatan dan kesimpulan dari hasil penelitian yaitu bahwa semakin tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah

6. Bapak Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, saran, kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Birokrasi dan pegawai lainnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area untuk jasa-jasanya selama masa perkuliahan.
8. Bapak Pimpinan, Staf, Karyawan dan Karyawati Kantor Samsat Medan Selatan, yang telah memberikan izin riset dan membantu dalam pengambilan data.
9. Seluruh Keluarga tercinta penulis, yang telah banyak memberikan motivasi baik materil maupun spiritual kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kata yang terindah yang penulis persembahkan atas balas jasa kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas selain ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan skripsi ini dan penulis bersedia menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk melengkapi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga penelitian dan penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian dan akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, Nopember 2011
Penulis

HARRY PRAMANA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORI	6
A. Uraian Teoritis	6
1. Pajak Kendaraan Bermotor	6
2. Jenis-Jenis Pajak Kendaraan Bermotor	16
3. Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor	17
4. Pengetrian Pendapatan Asli Daerah	18
5. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah	20
6. Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah	22
B. Kerangka Konseptual	23
C. Hipotesis Penelitian	24

BAB III : METODE PENELITIAN	25
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
B. Populasi dan Sampel	26
C. Variabel Penelitian	26
D. Tehnik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV : DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	30
A. Deskripsi Data.....	30
1. Sejarah Singkat dan Bidang Usaha Perusahaan	30
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	33
3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Medan Selatan	38
4. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara	41
B. Pembahasan.....	42
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

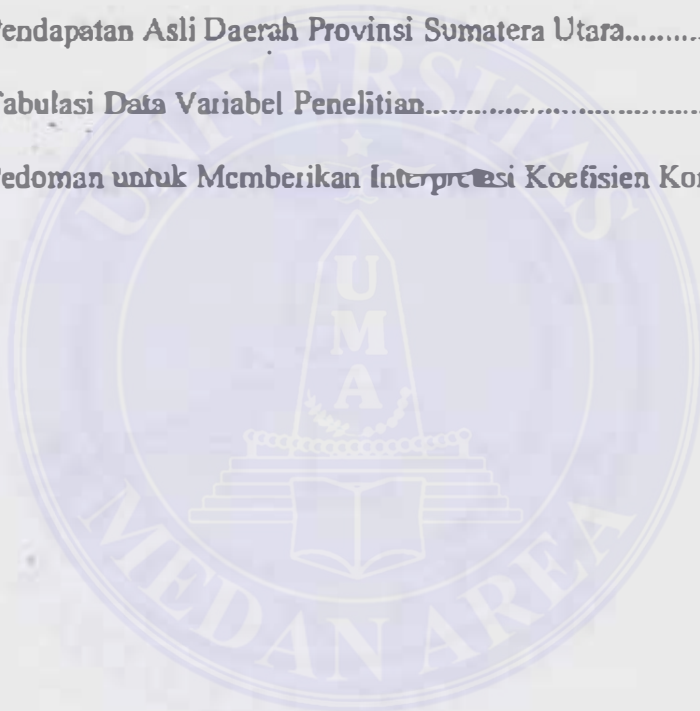
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Susunan Pelaksana Teknis (UPDT) Pendapat DPD.....	36
Gambar 2 : Kurva Pengujian Hipotesis.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rincian Waktu Penelitian.....	25
Tabel 2 : Kriteria Pengujian Hipotesis.....	29
Tabel 3 : Variabel Penelitian.....	29
Tabel 4 : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan Tahun 2005 s/d 2009.....	40
Tabel 5 : Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	42
Tabel 6 : Tabulasi Data Variabel Penelitian.....	47
Tabel 7 : Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sasaran pembangunan bukan semata-mata untuk kepentingan Pemerintah, melainkan seluruh bangsa dan negara dikaitkan dengan kehidupan negara yang demokrasi, sehingga demokratisasi tersebut tidak hanya terbatas pada demokratisasi manfaat semata, tetapi mencakup tujuan. Artinya pembangunan yang telah dicanangkan melalui operasional GBHN bukan hanya menjadi tujuan pemerintah saja, tetapi juga menjadi tujuan rakyat.

Beranjak dari tujuan pembangunan tersebut yang bukan hanya untuk Pemerintah semata tetapi segenap rakyat maka dalam hal ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan. Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan juga merupakan sumber dana dalam kelangsungan pembangunan negara dan bangsa. Menyadari peranan pajak yang strategis tersebut, maka pelaksanaan penerimaan pajak menjadi kewajiban warga negara.

Pajak adalah pungutan wajib yang dipungut oleh Pemerintah kepada wajib pajak yang dapat dipaksakan dengan tanpa adanya kontribusi langsung yang akan digunakan untuk pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, tambahan bahkan perubahan di

bidang perpajakan. Perubahan yang paling akhir di bidang perpajakan adalah dengan dikeluarkannya peraturan perpajakan tahun 2000.

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan negara yang nantinya digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Tata cara pemungutan pajak juga telah diatur oleh pemerintah dengan cara tidak memberatkan bagi rakyat yang nantinya merupakan subjek pajak atau wajib pajak. Namun demikian tidak semua rakyat dijadikan sebagai wajib pajak, dalam arti hanya orang atau badan usaha yang mempunyai penghasilan tertentu atau memiliki harta tertentu yang dapat dijadikan sebagai objek pajak khususnya pajak penghasilan atau pajak atas harta yang dimiliki.

Pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak badan ditentukan berdasarkan jenis pajaknya masing-masing. Salah satu pajak tersebut adalah pajak kendaraan bermotor yang wajib pajaknya adalah badan usaha atau perusahaan atau perorangan yang memiliki kendaraan bermotor.

Menurut peraturan perundang-undangan, yang mempunyai kendaraan bermotor wajib baginya untuk menyerahkan sejumlah iuran wajib berupa pajak kendaraan bermotor kepada pemerintah atas penggunaan jalan kenderaannya. Dalam arti kata yang memiliki kendaraan bermotor akan berhutang pajak dan bertanggung jawab atas pelunasannya. Dimana tempat pembayaran pajak kendaraan tersebut sudah ditunjuk pemerintah melalui suatu badan yaitu Kantor Samsat yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Diketahui bahwa pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 yang mengatur

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, 2006. *Perpajakan*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Djatmiko, 2006. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan undang-Undang Pajak Baru*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Dudi, 2008. *Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Halim, Abdul. 2006. *Anggaran Daerah dan "Fiskal Stress" (Sebuah Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kristono, 2006. *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Lewis Blane D. 2003. *Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charge in Indonesia*. Research Triangle Institute. North Carolina, Working Paper. Diakses dari <http://www.google.co.id>, Nopember 2009.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2006. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. *Economic Development and Culture Change*. Chicago, Vol 49. Diakses dari <http://www.google.co.id>, Januari 2010.
- Mardiasmo, 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2006. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghafira Indonesia, Jakarta.
- Sidik, Machfud. 2004. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Restribasi Daerah dalam Rangka Peningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2003-2004. Orasi Ilmiah.
- Suandy, 2006. *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kelima. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2007. *Metode Penelitian Manajemen Publik*. Edisi Kedua. Penerbit Liberty. Bandung

Waluyo dan Witawan B. Ilyas, 2003. *Perpajakan Indonesia Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru*, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wong, Jhon D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. Journal of Public Budgeting. Diakses dari <http://www.google.co.id>, Desember 2009.

Wurzel, 2004. *Solusi Perpajakan terlengkap Tanya Jawab dan Ilustrasi*, Penerbit Majalah Berita Pajak Bekerjasama Dengan PT. Prenhalindo.

